



PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 65.498.449.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp 917.297.959.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 235.561.248.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Rp 1.218.357.656.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 873.350.569.000,00
2) Belanja Bunga	Rp 1.250.000.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp -
4) Belanja Hibah	Rp 9.004.301.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 28.804.060.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 574.000.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 44.595.385.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 4.801.462.000,00</u>

Rp 962.379.777.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 32.092.709.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 149.643.002.000,00
3) Belanja Modal	<u>Rp 155.758.723.000,00</u>

Rp 337.494.434.000,00

Jumlah Belanja Rp 1.299.874.211.000,00

Surplus / (Defisit) Rp (81.516.555.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp 97.711.555.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp 16.195.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Neto Rp 81.516.555.000,00

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp -

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Januari 2011

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 28 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR 1





**KABUPATEN KLATEN**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran I Peraturan Bupati Klaten  
Nomor : 20 Tahun 2011  
Tanggal : 12 Juli 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.076.788.493.426,00	1.060.177.048.954,00	(16.611.444.472,00)	98,46	
1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	61.743.899.426,00	54.886.005.749,00	(6.857.893.677,00)	88,89	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.310.059.585,00	19.549.880.442,00	(2.760.179.143,00)	87,63	
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.490.000.000,00	14.764.846.356,00	(1.725.153.644,00)	89,54	
1.1.4	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	5.081.000.000,00	3.995.347.524,00	(1.085.652.476,00)	78,63	
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	17.862.839.841,00	16.575.931.427,00	(1.286.908.414,00)	92,80	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	850.195.048.000,00	845.975.281.673,00	(4.219.766.327,00)	99,50	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	53.418.283.000,00	49.198.516.673,00	(4.219.766.327,00)	92,10	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	726.234.465.000,00	726.234.465.000,00	0,00	100,00	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	70.542.300.000,00	70.542.300.000,00	0,00	100,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	164.849.546.000,00	159.315.761.532,00	(5.533.784.468,00)	96,64	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	8.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(6.000.000.000,00)	25,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40.380.997.000,00	40.267.282.444,00	(113.714.556,00)	99,72	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	85.786.060.000,00	85.787.035.600,00	975.600,00	100,00	
2	<b>BELANJA</b>	30.682.489.000,00	31.261.443.488,00	578.954.488,00	101,89	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.124.521.936.852,00	1.044.293.155.619,00	(80.228.781.233,00)	92,87	
2.1.1	Belanja Pegawai	931.352.586.852,00	902.080.818.119,00	(29.271.768.733,00)	96,86	
2.1.2	Belanja Bunga	819.689.355.000,00	806.746.958.986,00	(12.942.396.014,00)	98,42	
2.1.4	Belanja Hibah	1.035.000.000,00	1.000.822.381,00	(34.177.619,00)	96,70	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	22.528.680.000,00	17.293.045.998,00	(5.235.634.002,00)	76,76	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	39.808.324.000,00	39.252.767.000,00	(555.557.000,00)	98,60	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	544.000.000,00	403.850.582,00	(140.149.418,00)	74,24	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	38.894.585.000,00	36.844.253.172,00	(2.050.331.828,00)	94,73	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.852.642.852,00	539.120.000,00	(8.313.522.852,00)	6,09	
2.2.1	Belanja Pegawai	193.169.350.000,00	142.212.337.500,00	(50.957.012.500,00)	73,62	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.815.724.000,00	12.482.639.663,00	(1.333.084.337,00)	90,35	
2.2.2		97.049.820.045,00	89.587.909.599,00	(7.461.910.446,00)	92,31	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1		3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	82.303.805.955,00	40.141.788.238,00	(42.162.017.717,00)	48,7
		(47.733.443.426,00)	15.883.893.335,00	63.617.336.761,00	(33,2)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	73.198.443.426,00	66.374.255.188,00	(6.824.188.238,00)	90,0
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	67.048.615.057,00	60.509.626.568,00	(6.538.988.489,00)	90,2
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	5.732.214.369,00	5.864.628.620,00	132.414.251,00	102,2
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	417.614.000,00	0,00	(417.614.000,00)	0,0
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	25.465.000.000,00	19.464.964.500,00	(6.000.035.500,00)	76,4
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(6.000.000.000,00)	25,0
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	17.465.000.000,00	17.464.964.500,00	(35.500,00)	100,0
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	47.733.443.426,00	46.909.290.688,00	(824.152.738,00)	98,2
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	62.793.184.023,00	62.793.184.023,00	0,0

Klaten, 12 Juli 2011  
**BUPATI**

**SUNARNA, SE MHUM**